

Abstrak

PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

Oleh

M. FERYANDI WIRA WICAKSANA

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana serius yang memiliki dampak luas terhadap individu dan masyarakat. Indonesia, sebagai negara dengan kebijakan ketat dalam pemberantasan narkoba, menerapkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai dasar hukum dalam menanggulangi kasus peredaran narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana pengedar narkoba melalui studi Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dalam menganalisis permasalahan hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Lampung, akademisi dari Universitas Lampung, dan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Data sekunder bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian diolah melalui seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi. Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus Dwi Saputra Bin Iswan, pengadilan menerapkan Pasal 114 Ayat (1) *Jo* Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) *Jo* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Narkoba. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat dalam peredaran narkoba golongan I, sehingga dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp800.000.000,- dengan subsider 6 bulan kurungan. Faktor yang mempengaruhi penyelesaian kasus ini meliputi kekuatan alat bukti, tingkat keterlibatan terdakwa dalam jaringan peredaran narkoba, serta pertimbangan hakim terhadap aspek keadilan dan efek jera.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam kasus ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat tantangan dalam menyeimbangkan aspek keadilan, pencegahan, dan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kebijakan hukum yang

lebih adaptif terhadap konteks sosial serta strategi pemberantasan narkoba yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pendekatan preventif dan rehabilitatif.

Kata Kunci: Penerapan, Hukum Pidana, Narkoba, Putusan Pengadilan.

Abstract

THE APPLICATION OF CRIMINAL LAW IN THE PREVENTION AND RESOLUTION OF NARCOTICS DISTRIBUTION CASES (A Case Study of Verdict Number 831/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

By

M. Feryandi Wira Wicaksana

Narcotics crimes are serious offenses with widespread impacts on individuals and society. Indonesia, as a country with strict policies on narcotics eradication, enforces Law No. 35 of 2009 on Narcotics as the legal foundation for combating drug distribution cases. This study aims to analyze the application of criminal law in handling narcotics trafficking offenses through a case study of Verdict No. 831/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

This study employs a normative juridical and empirical juridical approach to analyze legal issues. Primary data is obtained through interviews with the National Narcotics Agency of Lampung Province (BNNP), academics from the University of Lampung, and judges from the Tanjung Karang District Court. Secondary data is sourced from various laws and regulations, court rulings, and legal literature. Data collection is conducted through literature studies and interviews, followed by processing through selection, classification, and systematization. Data analysis utilizes a qualitative method with an inductive approach to draw conclusions and provide recommendations.

The findings indicate that in the case of Dwi Saputra Bin Iswan, the court applied Article 114(1) Jo Article 132(1) and Article 112(1) Jo Article 132(1) of the Narcotics Law. The defendant was proven guilty beyond a reasonable doubt for conspiracy in the distribution of Category I narcotics, leading to a sentence of 5 years and 6 months imprisonment and a fine of IDR 800,000,000, with a subsidiary punishment of 6 months in prison if the fine is not paid. Several factors influenced the resolution of this case, including the strength of the evidence, the defendant's role in the drug network, and the court's considerations of justice and deterrence effects.

The enforcement of criminal law in this case aligns with existing legal provisions. However, challenges remain in balancing justice, prevention, and rehabilitation for narcotics offenders. Therefore, a more adaptive legal policy is needed, focusing not only on punitive measures but also on preventive and rehabilitative approaches to effectively combat drug-related crimes.

Keywords: Application, Criminal Law, Narcotics, Court Verdict.